

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pembahasan pada bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka sebagai landasan kerangka pemikiran dan hipotesis. Dalam melaksanakan penelitian sebuah pemahaman tentang penelitian yang akan dilakukan dinilai sangat penting. Sehingga dalam pembahasan permasalahan mengenai **Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, PMDN, dan Akses Internet di Pulau Jawa Periode 2016-2024** membutuhkan teori yang relevan dengan penelitian.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

2.1.1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Besaran PDRB antar wilayah dapat berbeda karena variasi potensi serta faktor-faktor produksi di masing-masing daerah. Sementara itu, pendapatan per kapita merupakan rata-rata pendapatan penduduk dalam suatu negara selama satu tahun. Terdapat dua pendekatan dalam perhitungannya yaitu menggunakan harga konstan dan harga berlaku. Jika dihitung berdasarkan harga konstan, maka hasilnya disebut pendapatan per kapita riil. Sebaliknya, jika perhitungannya berdasarkan harga berlaku menghasilkan pendapatan per kapita nominal.

Pendapatan per kapita nominal merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang belum disesuaikan dengan perubahan harga atau inflasi. Sementara itu,

pendapatan per kapita riil adalah pendapatan per kapita yang telah disesuaikan inflasi. GDP per kapita memiliki peran penting karena semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula peluangnya untuk mengakses layanan keuangan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator yang umum dipakai untuk menilai sejauh mana pembangunan ekonomi suatu daerah berhasil. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang terbatas sehingga mampu mendorong perubahan struktural, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan struktur perekonomian yang lebih seimbang. PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB per kapita didapatkan dari hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (Dewanto & Rahmawati, 2021).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menunjukkan rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap penduduk di suatu daerah dalam periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. Indikator ini kerap dimanfaatkan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Umumnya, semakin tinggi pendapatan per kapita suatu wilayah, maka semakin besar pula kemungkinan wilayah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan masyarakat yang tinggi (Novianti, 2025).

2.1.1.2 Jenis-Jenis PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah (BPS, 2025).

Indikator ini memberikan gambaran rata-rata pendapatan atau nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap individu di daerah tersebut, sehingga sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita dapat dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB), dan atas dasar harga konstan (ADHK).

a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah selama satu tahun, dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk melihat struktur perekonomian, perubahan antar sektor, serta kapasitas sumber daya ekonomi daerah pada tahun berjalan. Karena dipengaruhi oleh inflasi atau perubahan harga, PDRB ADHB mencerminkan nilai nominal aktivitas ekonomi di wilayah tersebut pada tahun bersangkutan.

b) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) adalah nilai tambah bruto dihitung menggunakan harga pada satu tahun acuan (tahun dasar), bukan harga tahun berjalan. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tanpa dipengaruhi inflasi atau perubahan harga. Oleh karena itu, PDRB harga konstan menjadi indikator penting untuk melihat perkembangan ekonomi yang sesungguhnya, karena hanya menggambarkan perubahan *volume* atau jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, bukan akibat kenaikan harga.

Dalam pembangunan daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menjadi indikator penting untuk menilai tingkat keberhasilan ekonomi suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB per kapita, biasanya menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut semakin baik. Selain itu, indikator ini juga bermanfaat untuk membandingkan tingkat kemakmuran antarwilayah serta menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan pembangunan.

2.1.1.3 Pendekatan PDRB per Kapita

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) terdapat tiga pendekatan dalam menghitung PDRB per kapita, adalah:

a) Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, perhitungan pendapatan nasional dilakukan dengan menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambahan dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan.

Secara sistematis, pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \{(Q_1P_1) + (Q_2P_2) + \dots + (Q_nP_n)\}$$

Keterangan:

Y	= Pendapatan Nasional
Q	= Jumlah Barang dan Jasa
P	= Harga Barang dan Jasa
1, 2, 3,..., n	= Jenis Barang dan Jasa

b) Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, perhitungan pendapatan nasional dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat di suatu

negara dalam jangka waktu 1 tahun. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi yang berupa SDA, SDM, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Jika faktor produksi digunakan dalam proses produksi, maka bentuk balas jasa yang diperoleh oleh pemilik faktor ekonomi antara lain:

- Balas jasa untuk tenaga kerja berupa upah
- Balas jasa untuk modal berupa bunga
- Balas jasa untuk kewirausahaan memperoleh laba/keuntungan

Secara sistematis, pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = W + R + I + \pi$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

W = Upah Kerja

R = Sewa Tanah

I = Bunga Modal

π = Laba/Keuntungan

c) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi untuk membeli barang dan jasa selama satu tahun. Pada pendekatan ini dimana menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir *output* yang dihasilkan suatu perekonomian berdasarkan harga pasar yang berlaku, atau secara singkat dari penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Komponen-komponennya adalah:

- Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan Lembaga swasta yang tidak mencari laba.

- Pengeluaran pemerintah.
- Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- Perubahan stok.
- Ekspor netto.

Secara sistematis, pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G (X - M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi Rumah Tangga

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Pendapatan Nasional (Y) diperoleh berdasarkan metode pengeluaran dapat melakukan perhitungan yang terdiri dari adanya metode konsumsi rumah tangga (C), metode investasi (I), dan metode pengeluaran pemerintah (G) jika sektor perdagangan luar negeri bersifat terbuka maka adanya ekspor (X) dan Impor (M). Hal tersebut akan menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Dapat dituliskan dengan sebuah rumus untuk mendapatkan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G$. Dalam rumusan ini tersirat bahwa perekonomian negara bersifat tertutup, tidak ada hubungan ekonomi dengan pihak luar negeri atau negara lain tetapi jika bersifat terbuka lalu terdapat ekspor dan impor maka rumus pendapatan nasional tersebut akan menjadi $Y = C + I + G (X - M)$.

2.1.1.4 Faktor Pendukung PDRB Per Kapita

Secara umum, PDRB per kapita dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencerminkan kapasitas produksi daerah, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan dan infrastruktur. Faktor-faktor pendukung utamanya antara lain:

a) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Tingkat pendidikan, keterampilan, dan kesehatan tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap produktivitas. Semakin tinggi kualitas SDM, semakin besar output yang dihasilkan per penduduk, sehingga PDRB per kapita meningkat

b) Investasi (PMDN dan PMA)

Investasi memperbesar kapasitas produksi melalui penambahan modal, teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Arus investasi yang tinggi mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif dan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

c) Struktur dan Produktivitas Sektor Ekonomi

Daerah dengan dominasi sektor industri dan jasa modern umumnya memiliki PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan daerah yang masih bergantung pada sektor primer berproduktivitas rendah.

d) Tingkat Upah dan Kesempatan Kerja

Upah yang lebih tinggi seiring dengan peningkatan produktivitas akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong daya beli, yang pada akhirnya tercermin dan mempengaruhi PDRB per kapita.

e) Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh dinamika penduduk. Pertumbuhan output yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk akan meningkatkan PDRB per kapita.

f) Akses Teknologi dan Inovasi

Pemanfaatan teknologi dan inovasi meningkatkan efisiensi produksi serta nilai tambah sektor ekonomi, sehingga mendorong peningkatan output per individu.

2.1.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. Teori yang mengungkapkan tentang konsep pertumbuhan ekonomi, secara umum yaitu:

a) Teori Fungsi Produksi Cobb-Douglas

Fungsi produksi merupakan konsep dasar dalam teori ekonomi yang menjelaskan hubungan antara input produksi dan output yang dihasilkan dalam suatu proses produksi. Salah satu bentuk produksi yang paling banyak digunakan dalam analisis pertumbuhan ekonomi adalah *Cobb-Douglas Production Function*. Fungsi produksi pertama kali diperkenalkan oleh Charles W. Cobb dan Paul H. Douglas untuk menggambarkan hubungan antara faktor produksi utama, yaitu modal (*capital*) dan tenaga kerja (*labor*), terhadap output ekonomi yang dihasilkan. Model ini banyak digunakan dalam analisis ekonomi makro maupun ekonomi regional karena mampu menjelaskan bagaimana perubahan pada faktor produksi memengaruhi tingkat output suatu perekonomian (Balk, 2024).

Secara matematis, fungsi produksi Cobb-Douglas dinyatakan dalam bentuk:

$$Y = AK^{\alpha}L^{\beta}$$

Di mana Y merupakan output atau tingkat produksi, K menunjukkan modal (*capital*), L menunjukkan tenaga kerja (*labor*), sedangkan A menggambarkan tingkat teknologi atau efisiensi produksi yang sering disebut sebagai *total factor productivity*. Parameter α dan β menunjukkan elastisitas output terhadap modal dan tenaga kerja yang mencerminkan kontribusi masing-masing faktor produksi terhadap peningkatan output ekonomi. Dengan demikian, peningkatan modal maupun tenaga kerja akan meningkatkan output ekonomi selama faktor produksi tersebut digunakan secara produktif (Astopolov, 2016).

Dalam perkembangan teori pertumbuhan ekonomi modern, fungsi Cobb-Douglas juga sering digunakan untuk menjelaskan peran teknologi dalam meningkatkan produktivitas. Variabel teknologi tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi, inovasi, serta peningkatan efisiensi produksi dapat meningkatkan output meskipun jumlah modal dan tenaga kerja tetap. Oleh karena itu, fungsi produksi ini sering digunakan dalam analisis pertumbuhan ekonomi untuk melihat kontribusi modal, tenaga kerja, dan teknologi terhadap peningkatan output wilayah.

Dalam konteks penelitian ini, fungsi produksi Cobb-Douglas digunakan sebagai *grand theory* untuk menjelaskan bahwa tingkat output ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB per kapita dipengaruhi oleh faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, serta perkembangan teknologi. Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merepresentasikan akumulasi modal (*capital stock*), Rata-

Rata Lama mencerminkan kualitas tenaga kerja sebagai bagian dari faktor *labor*, Upah Minimum Provinsi berkaitan dengan produktivitas dan insentif tenaga kerja, sedangkan akses internet mencerminkan perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, perbedaan akumulasi modal, kualitas tenaga kerja, dan teknologi antarwilayah dapat memengaruhi perbedaan tingkat PDRB per kapita di masing-masing daerah.

b) Teori Adam Smith

Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya penambahan penduduk. Dengan adanya penambahan penduduk, maka akan terdapat penambahan output atau hasil. Jumlah penduduk akan meningkat jika upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup (Swastika, 2024).

Menurut Adam Smith, tingkat upah terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja sendiri dipengaruhi oleh jumlah modal yang tersedia serta tingkat output dalam perekonomian. Dengan demikian, pertumbuhan permintaan terhadap tenaga kerja bergantung pada peningkatan stok modal yang mencakup proses akumulasi modal dan pertumbuhan output.

Teori Adam Smith ini tertian dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, dimana dia menyatakan bahwa empat faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan, dan akhirnya jumlah utang (Prastiwi et al., 2025).

2.1.2 Tingkat Pendidikan

2.1.2.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan lah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi dirinya menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, serta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk masyarakatnya.

Sedangkan menurut Martinus Jan Langeveld dalam (pgsdupy, 2018), Pendidikan merupakan proses sadar dan terencana untuk menyiapkan diri peserta didik melalui bimbingan juga pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri menjadi pribadi yang berpengetahuan, berketerampilan, memiliki akhlak mulia, dan mampu menjalankan perannya di masa depan.

Rata-rata lama sekolah merupakan Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis Pendidikan yang pernah ditempuh (BPS, 2023). Juga dapat diartikan RLS merupakan angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan kualitas Pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah dipengaruhi

oleh angka putus sekolah akibat ketidakmampuan membayar biaya Pendidikan. Disamping itu masih terdapat beberapa factor yang menyebabkan anak putus sekolah seperti factor lingkungan, pemahaman atas pentingnya Pendidikan, budaya, fasilitas Pendidikan, dan lain-lain. Indikator ini mencerminkan kualitas sistem Pendidikan dan tingkat pencapaian pendidikan suatu negara, serta merupakan salah satu komponen dalam pengukuran capaian pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional memiliki tujuan dalam mengupayakan kemampuan peserta didik lebih berkembang agar menjadi manusia beriman dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Perlu adanya usaha yang terencana agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Tingkat pendidikan dapat digambarkan secara keseluruhan merupakan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas. UNDP pada tahun 1990 telah menyusun angka rata-rata lama sekolah dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi pembangunan manusia dan perencanaan program wajib belajar nasional.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator penting untuk mengetahui tingkat pembangunan manusia dan kualitas modal manusia di suatu wilayah. Dalam perspektif ekonomi pendidikan, Schultz (1961), menekankan

bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi modal manusia yang mampu meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kemampuan ekonomi individu. Pandangan ini juga diperkuat oleh Becker (1964) yang menjelaskan bahwa jumlah tahun sekolah yang ditempuh seseorang akan mencerminkan besarnya investasi dalam modal manusia, sehingga semakin tinggi durasi pendidikan maka semakin besar pula peningkatan produktivitas dan pendapatan yang dapat dihasilkan. Mincer (1974) melalui *Earnings Function* menunjukkan bahwa *years of schooling* atau lamanya pendidikan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pendapatan, yang berarti wilayah dengan RLS yang tinggi cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih produktif dan pendapatan yang lebih besar. Selain itu, Hanushek & Woessmann (2007) menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berdampak pada kualitas individu saja, tetapi secara agregat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah termasuk peningkatan PDRB per kapita. Psacharopoulos & Patrinos (2018) juga menemukan bahwa setiap tambahan tahun sekolah akan memberikan imbal hasil ekonomi yang nyata melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Rata-rata lama sekolah merupakan perhitungan rata-rata jumlah tahun yang telah di selesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah mencerminkan kualitas pendidikan dalam suatu wilayah masyarakat tertentu. Rata-rata lama sekolah dapat dihitung dengan menggunakan variabel partisipasi, tingkat atau kelas yang sedang ataupun pernah dijalani dan ijazah terakhir yang dimiliki. Perhitungan rata-rata lama sekolah dihitung dari penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Adapun rumus yang digunakan dalam

menghitung Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) sebagai berikut:

$$MYS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Lama Sekolah Penduduk}$$

Rencana yang telah dibuat oleh pemerintah dalam mengupayakan pendidikan masyarakat adalah dengan adanya program wajib belajar 12 tahun untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada penduduk usia 16 hingga 19 tahun atau peserta didik pada tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat.

Teori Rata-Rata Lama Sekolah menurut para ahli:

a) Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Menurut Schultz (1961) & Becker (1964) menyatakan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi yang mampu meningkatkan produktivitas, keterampilan, pengetahuan, dan efisiensi manusia di suatu wilayah. Semakin tinggi RLS, semakin besar kemampuan tenaga kerja menghasilkan output yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.

b) Teori Pertumbuhan Endogen (*Endogenous Growth Theory*)

Menurut Romer (1986) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh factor internal, salah satunya akumulasi modal manusia diperoleh melalui pendidikan. Dalam teori ini, pendidikan yang tercermin dari RLS meningkatkan kemampuan inovasi, pengetahuan teknologi, serta efektivitas tenaga kerja dalam memproduksi output. Semakin tinggi RLS, semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.2.2 Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan di Indonesia menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003) yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No. 20/20023) . Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan diarahkan tidak hanya p ada aspek kognitif dan keterampilan, tetapi juga pada aspek moral, spiritual, kepribadian, dan tanggung jawab.

Selaras dengan nilai-nilai dasar kebangsaan sebagaimana diuraikan dalam perspektif Pancasila, tujuan pendidikan nasional juga untuk membentuk manusia Indonesia holistik: beriman, berbudi pekerti luhur, demokratis, dan memiliki tanggung jawab sosial serta keadilan (Rukiyati, 2019).

Di samping itu, dalam era global dan pembangunan berkelanjutan, pendidikan modern berorientasi pada pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkesinambungan seperti ditunjukkan dalam upaya pencapaian SDGs 4 (*quality and inclusive education*), di mana pendidikan berperan penting dalam mempersiapkan manusia agar mampu bersaing di era global dan adaptif terhadap perubahan zaman (Yanuarto et al., 2025).

2.1.2.3 Indikator Pendidikan

a) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

RLS mengukur jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Semakin tinggi RLS, maka semakin baik kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Badan PBB untuk pendidikan (UNDP,

2023) memasukan RLS sebagai komponen utama dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia karena dianggap sebagai indicator fundamental dalam mengukur kemampuan dasar masyarakat.

b) Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS menggambarkan berapa lama seorang anak yang baru masuk sekolah diperkirakan akan mengenyam pendidikan formal apabila pola partisipasi pendidikan saat ini tetap. Indikator ini mencerminkan prospek pendidikan masa depan dan menjadi alat evaluasi bagi keberlanjutan pembangunan pendidikan (BPS, 2024).

c) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis. UNESCO (2022) menjelaskan bahwa kemampuan literasi dasar merupakan fondasi bagi partisipasi ekonomi dan sosial masyarakat.

2.1.2.4 Teori Tingkat Pendidikan dan Rata-Rata Lama Sekolah

a) Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Teori *Human Capital* (modal manusia) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi yang dilakukan individu maupun negara untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan produktivitas sumber daya manusia. Becker (1964) dan Schultz (1961) menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya aktivitas konsumtif, tetapi merupakan investasi produktif yang memberikan *return* dalam bentuk peningkatan kompetensi, produktivitas kerja, dan pendapatan.

Menurut teori ini, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar kemampuan kognitif dan keterampilannya dalam memproses informasi, memanfaatkan teknologi, serta mengambil keputusan produktif dalam aktivitas ekonomi. Pendidikan mampu meningkatkan efisiensi seseorang dalam bekerja sehingga menghasilkan tambahan output ekonomi.

Tingkat pendidikan menggambarkan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan oleh penduduk, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Schultz (1961) juga menjelaskan bahwa peningkatan tingkat pendidikan akan memperkuat kualitas modal manusia karena setiap tambahan tahun sekolah akan meningkatkan kemampuan belajar, kemampuan teknis, dan keterampilan adaptasi seseorang terhadap dinamika ekonomi modern. Hal ini sejalan dengan pandangan Romer (1990) yang menekankan bahwa tenaga kerja berpendidikan cenderung lebih cepat mengadopsi inovasi dan teknologi, sehingga mempercepat pertumbuhan produktivitas.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator kuantitatif yang menggambarkan jumlah tahun sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk umur 25 tahun ke atas. dalam kerangka *Human Capital*, RLS mencerminkan akumulasi investasi pendidikan selama tahap kehidupan penduduk. Semakin tinggi RLS, semakin besar kapasitas produktif masyarakat. UNDP (*United Nations Development Programme*) memasukkan RLS sebagai salah satu indikator utama dalam *Human Development Index* (HDI) karena dianggap sebagai ukuran fundamental untuk memprediksi kemampuan ekonomi suatu wilayah.

RLS tidak hanya menunjukkan akses pendidikan, tetapi juga kualitas modal manusia yang tersedia untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Penelitian OECD (2022) menunjukkan bahwa tambahan satu tahun sekolah dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sebesar 5-15%, bergantung pada kualitas institusi pendidikan suatu negara.

Berdasarkan teori tersebut, semakin tinggi RLS, maka:

- Kualitas sumber daya manusia meningkat baik dalam kemampuan teknis, manajerial, maupun adaptasi teknologi.
- Produktivitas tenaga kerja meningkat, sehingga output produksi meningkat di berbagai sector ekonomi.
- Pendapatan individu meningkat, sehingga mendorong peningkatan daya beli dan aktivitas ekonomi.
- Kinerja ekonomi daerah meningkat, tercermin dari peningkatan PDRB per kapita.

2.1.3 Upah Minimum Provinsi

Dalam Undang-Undang 1945, dijelaskan pada Pasal 27 ayat (2) dasar hukum sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi umat manusia”. Dengan demikian, upah yang harus diterima oleh pekerja untuk layanan yang telah mereka kerjakan harus berupa upah yang wajar.

Secara umum, upah merupakan jumlah yang diterima pekerja selama mereka bekerja atau dianggap dengan pekerjaan. Menurut Pasal 1 No. 30 UU No. 13 Tahun 2003, pengertian gaji adalah hal pekerja/buruh yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah merupakan hak pekerja yang harus ditetapkan sehingga merupakan suatu bentuk perlindungan pekerja. Oleh karena itu, menurut UU tersebut kebijakan perlindungan pengupahan meliputi:

- a) Upah Minimum
- b) Upah kerja lembur
- c) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
- e) Upah untuk menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- f) Bentuk dan cara potongan upah
- g) Hal-hal yang tidak diperhitungkan dengan upah
- h) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- i) Upah untuk pembayaran pesangon
- j) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

Adapun salah satu faktor produksi yang mempengaruhi produksi adalah karyawan. Tenaga kerja dapat membantu dalam proses produksi untuk memastikan bahwa menghasilkan output yang diinginkan oleh perusahaan. Pengorbanan keberadaan pekerja untuk perusahaan maka pekerja berhak atas upah yang

diberikan oleh perusahaan kepada pekerja tersebut dalam bentuk upah. Sukirno & Sudono (2005) membedakan dua konsep upah yaitu:

- a) Upah nominal (upah) merupakan jumlah yang diterima pekerja dari pemberi kerja sebagai kompensasi atas kerja mental dan fisik dari pekerja yang digunakan dalam proses produksi
- b) Upah riil merupakan tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

Menurut Simanjuntak dalam Qolbi (2024), menyatakan bahwa upah merupakan imbalan yang diterima seseorang atas jasa-jasa tenaga kerja yang diberikannya kepada pihak lain, yang diberikan baik seluruhnya berupa uang maupun sebagian berupa artefak. Dalam penelitian ini, upah minimum digunakan untuk mempengaruhi tingkat penyerapan karyawan.

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan batas upah terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja di suatu provinsi, yang penetapannya dilakukan oleh gubernur berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri tenaga kerja. UMP berfungsi sebagai perlindungan sosial bagi pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup di daerah masing-masing. Penetapan UMP mempertimbangkan beberapa faktor utama seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks kebutuhan hidup layak sehingga besaran UMP dapat mencerminkan kondisi sosial-ekonomi di wilayah tersebut (Resmana & Gunawan, 2025).

Menurut teori ekonomi ketenagakerjaan, upah minimum dapat berdampak pada daya beli masyarakat, yang kemudian mempengaruhi akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Menurut Faizin (2021), menaikkan upah minimum memiliki dampak yang baik bagi IPM karena meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar. Hipotesis ini juga menyatakan kemungkinan meningkatnya pengangguran jika upah minimum terlalu tinggi, karena perusahaan akan kesulitan untuk mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Upah Minimum Provinsi merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan ketenagakerjaan yang berperan untuk melindungi kesejahteraan pekerja serta menjaga kestabilan ekonomi di tingkat daerah. Penetapan UMP yang optimal dan berkelanjutan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan serikat pekerja agar tujuan pembangunan yang adil dan inklusif dapat tercapai.

Penetapan upah minimum mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Komponen KHL disusun berdasarkan kebutuhan pekerja untuk memenuhi standar kebutuhan dasar secara layak, mencakup kebutuhan harian seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lainnya dalam satu bulan. Upah minimum cenderung meningkat setiap tahun seiring meningkatnya upah nominal kesejahteraan (riil). Sehingga, penetapan upah minimum bertujuan untuk menjamin penghasilan yang diterima oleh para tenaga kerja agar tidak lebih dari suatu tingkat tertentu.

2.1.3.1 Komponen Penentu Upah Minimum Provinsi

Penetapan Upah Minimum Provinsi didasarkan pada beberapa komponen utama yang mencerminkan kondisi ekonomi makro dan kesejahteraan tenaga kerja di suatu daerah. Komponen-komponen tersebut meliputi:

a) Inflasi

Inflasi merupakan indikator perubahan harga barang dan jasa yang memengaruhi daya beli pekerja. Tingkat inflasi dijadikan dasar penyesuaian UMP agar upah riil pekerja tidak mengalami penurunan akibat kenaikan biaya hidup.

b) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah perekonomian daerah. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki kemampuan lebih besar untuk menetapkan UMP yang lebih tinggi tanpa mengganggu stabilitas dunia usaha.

c) Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja menunjukkan kemampuan pekerja dalam menghasilkan output. Peningkatan produktivitas menjadi landasan penting dalam penetapan upah minimum karena memungkinkan kenaikan upah yang sejalan dengan peningkatan efisiensi dan daya saing perusahaan.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan UMP

Selain komponen utama, besaran Upah Minimum Provinsi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang bersifat struktural dan institusional, antara lain:

a) Kondisi Pasar Tenaga Kerja

Kondisi pasar tenaga kerja, seperti tingkat pengangguran dan ketersediaan tenaga kerja, memengaruhi kebijakan upah minimum. Surplus tenaga kerja cenderung menekan tingkat upah, sedangkan keterbatasan tenaga kerja mendorong peningkatan upah.

b) Kemampuan dan Keberlangsungan Dunia Usaha

Penetapan UMP mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam membayar upah minimum agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha, terutama pada sektor padat karya yang sensitif terhadap kenaikan biaya tenaga kerja.

c) Struktur dan Karakteristik Ekonomi Daerah

Perbedaan struktur ekonomi, tingkat industrialisasi, dan sektor unggulan antar daerah menyebabkan variasi besaran UMP. Daerah dengan dominasi sektor industri dan jasa modern umumnya memiliki UMP yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan yang masih didominasi sektor primer.

d) Kondisi Sosial dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat turut menjadi pertimbangan dalam penetapan UMP. Kebijakan upah minimum diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Penetapan Upah Minimum Provinsi dilakukan melalui mekanisme tripartit, yaitu melibatkan tiga pihak utama yakni pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan dunia usaha. Ketiga unsur

tersebut tergabung dalam Dewan Pengupahan Provinsi, yang berperan memberikan rekomendasi besaran UMP kepada gubernur. Pemerintah berperan sebagai regulatos dan penengar, pengusaha mewakili kepentingan dunia usaha, sementara pekerja atau buruh menyuarakan aspirasi terkait kesejahteraan dan kebutuhan hidup layak.

Meskipun perumusannya melibatkan mekanisme tripartit, kewenangan penetapan akhir UMP berada pada gubernur. Gubernur menetapkan UMP melalui peraturan kepala daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan serta kebijakan pengupahan yang berlaku. Mekanisme ini berbeda dengan perundingan bipartit, yang hanya melibatkan pengusaha dan pekerja dan umumnya digunakan pada penetapan upah di tingkat perusahaan melalui perjanjian kerja bersama.

Penetapan upah minimum dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kebijakan pemerintah yang mampu melindungi hak dan kepentingan pekerja. Upah minimum berfungsi sebagai batas pengaman agar tidak terjadi pembayaran upah di bawah ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga keberlangsungan usaha serta mendorong terciptanya lapangan kerja yang produktif.

2.1.3.3 Teori Upah Efisiensi

Teori upah efisiensi menjelaskan bahwa pemberian upah yang lebih tinggi kepada pekerja dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi dalam proses produksi. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan atau pemerintah dapat meningkatkan kinerja tenaga kerja dengan memberikan tingkat upah yang relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat upah pasar. Upah yang lebih tinggi dapat

meningkatkan motivasi kerja, loyalitas, kesehatan, serta mengurangi tingkat absensi dan pergantian tenaga kerja sehingga produktivitas pekerja menjadi lebih optimal.

Konsep ini banyak dikembangkan oleh Joseph Stiglitz yang menjelaskan bahwa perusahaan seringkali membayar upah di atas tingkat keseimbangan pasar untuk mendorong pekerja bekerja lebih produktif serta mengurangi perilaku tidak efisien seperti kemalasan atau tingkat perpindah kerja yang tinggi. Upah yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori upah efisiensi digunakan untuk menjelaskan bahwa peningkatan upah minimum provinsi dapat memberikan insentif bagi tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan daya beli tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi daerah yang tercermin dalam peningkatan PDRB per kapita.

2.1.4 Investasi

2.1.4.1 Pengertian Investasi

Investasi merupakan aktivitas penanaman modal yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dengan tujuan memperoleh manfaat atau keuntungan di masa mendatang. Dalam ekonomi, investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian (Samuelson & Nordhaus,

2009). Investasi sangat penting karena berfungsi sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Investasi

Investasi juga dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kriteria. Pengelompokan ini penting untuk memahami karakteristik investasi yang digunakan dalam analisis ekonomi dan kebijakan pembangunan:

a) Berdasarkan Bentuknya

- Investasi Fisik (*Physical Investment*)

Investasi dalam bentuk barang modal berwujud seperti mesin, bangunan pabrik, peralatan produksi, kendaraan operasional, dan infrastruktur. Jenis investasi ini langsung meningkatkan kapasitas produksi.

- Investasi Non-Fisik/Modal Manusia (*Human Capital Investment*)

Meliputi Investasi dalam pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Becker (1993) menyebutkan bahwa investasi manusia berperang besar dalam meningkatkan produktivitas jangka panjang.

b) Berdasarkan Sumber Dana

- Penanaman Modal Asing (PMA/FDI)

Menurut Jhingan dalam (Arista, 2024.) Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta di negara asal pemilik modal atau pemilik modal suatu negara ke negara lain atas nama pemerintah negara pemilik modal. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Apabila investor asing ingin melakukan penanaman modal di

Indonesia diwajibkan untuk mempekerjakan masyarakat Indonesia terlebih dahulu. Selain itu, pihak perekrut diwajibkan untuk melakukan pelatihan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan dipekerjakan. Keberadaan PMA memberikan manfaat besar seperti transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal (*knowledge spillover*), perluasan kapasitas produksi, serta peningkatan ekspor (Todaro & Smith, 2020).

PMA juga memiliki peran penting dalam mengisi kekuarangan modal domestik terutama pada sektor-sektor padat modal seperti industri berat energi telekomunikasi, dan manufaktur. Selain itu, PMA dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui integrasi rantai pasok global (*global value chains*).

- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan sarana penanaman modal untuk diupayakan oleh investor dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Keberadaan investor yang merupakan Warga Negara Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti melalui penyerapan tenaga kerja. Tidak hanya di sisi investor, pemerintah daerah juga harus terus melakukan usaha agar investor tertarik melakukan penanaman modal di daerah tersebut.

PMDN ini juga menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi regional dan nasional karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi domestik, serta penguatan kapasitas industri dalam negeri. Keberadaan PMDN ini sangat

strategis dalam meningkatkan daya saing industri nasional, mengurangi ketergantungan terhadap modal asing, serta memperkuat infrastruktur ekonomi domestik (BPKM, 2023).

Dalam konteks pembangunan daerah, PMDN juga berperang mendorong pemerataan pembangunan ekonomi melalui distribusi investasi ke berbagai sektor seperti manufaktur, jasa, transportasi, dan infrastruktur. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) mencatat bahwa peningkatan PMDN berdampak positif terhadap kenaikan pendapatan daerah, perluasan kesempatan kerja, serta meningkatkan produktivitas regional.

Kemudian, berikut manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) antara lain, yaitu:

- a) Mengurangi ketergantungan negara terhadap produk asing
- b) Mampu menghemat devisa
- c) Mendorong kemajuan industri dalam negeri
- d) Memberikan kontribusi sebagai penyerapan tenaga kerja.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki peran penting dalam meningkatkan PDRB per kapita melalui mekanisme efek pengganda (Multiplier Effect). Menurut Teori Koefisien Multiplier Keynesian, peningkatan investasi akan mendorong kenaikan pendapatan nasional yang lebih besar dibandingkan nilai investasi awal. PMDN tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang selanjutnya mendorong konsumsi dan output regional. Dengan demikian,

peningkatan PMDN di Pulau Jawa berpotensi memberikan dampak positif terhadap PDRB per kapita melalui efek pengganda ekonomi.

2.1.4.3 Teori Koefisien Multiplier

Teori koefisien multiplier (*multiplier effect*) merupakan konsep dalam teori ekonomi makro yang menjelaskan bahwa peningkatan investasi dalam suatu perekonomian akan menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang lebih besar dibandingkan dengan nilai investasi awal. Konsep ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa setiap tambahan investasi akan memicu peningkatan permintaan agregat, yang kemudian meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesempatan kerja dalam perekonomian (Mankiw, 2021). Proses ini terjadi secara berantai karena pendapatan yang diterima oleh masyarakat dari kegiatan ekonomi tersebut akan kembali dibelanjakan untuk konsumsi sehingga menciptakan aktivitas ekonomi baru.

Secara sederhana, multiplier menggambarkan seberapa besar perubahan investasi. Besarnya nilai multiplier dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi atau *marginal propensity to income* (MPC). Semakin besar kecenderungan masyarakat untuk membelanjakan pendapatannya, maka semakin besar pula efek pengganda yang dihasilkan dalam perekonomian (Blanchard & Johnson, 2017).

Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan investasi seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme *multiplier effect*. Investasi yang masuk ke suatu wilayah akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat,

serta mendorong peningkatan konsumsi dan produksi di berbagai sektor ekonomi. Dampak berantai tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan output ekonomi daerah yang tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita (Todaro & Smith, 2020).

2.1.5 Akses Internet

2.1.5.1 Pengertian Akses Internet

Akses internet merujuk pada kemampuan individu, rumah tangga, organisasi, atau lokasi tertentu untuk tersambung dan menggunakan layanan internet baik melalui jaringan tetap (*fixed*) maupun seluler (*mobile*). Dalam pengukuran resmi, misalnya oleh ITU, salah satu indikator dasar adalah apakah internet tersedia untuk digunakan oleh seluruh anggota rumah tangga kapan saja (*household with internet acces*) (ITU, 2017).

Menurut World Bank (2016), Akses internet memiliki Dimensi dan Komponen Akses serta bersifat multidimensional dan tidak hanya soal ketersediaan jaringan, komponen penting meliputi:

- a) Ketersediaan (*avaibility*): Infrastruktur fisik seperti jaringan kabel/fiber, BTS seluler, dan titik akses publik.
- b) Keterjangkauan (*affordability*): Biaya paket data dan perangkat yang diperlukan agar penggunaan internet menjadi layak bagi berbagai lapisan masyarakat.
- c) Kualitas Layanan (*quality*): Kecepatan, stabilitas, *latency*, dan kapasitas jaringan yang memengaruhi pengalaman pengguna.

- d) Kemampuan dan penggunaan bermakna (*skill & meaningful use*): Literasi digital, motivasi, dan konteks sosial-ekonomi yang menentukan bagaimana akses tersebut dimanfaatkan secara produktif.

Indikator yang sering digunakan dalam penelitian dan publikasi institusional meliputi: persentase individu yang menggunakan internet (*individuals using the internet %*), persentase rumah tangga dengan akses internet, penetrasi broadband (*fixed & mobile*), rata-rata kecepatan akses, serta indikator keterjangkauan (proporsi pendapatan yang digunakan untuk layanan). Data-data ini kerap dipakai untuk memantau pencapaian tujuan pembangunan terkait ICT dan SDG.

Bukti empiris menunjukkan bahwa perluasan akses broadband dan peningkatan kualitas konektivitas dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, karena akses internet mempercepat difusi teknologi, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi produksi. Namun, efek positif tersebut bergantung pada faktor pelengkap seperti tingkat pendidikan, kapasitas institusi, dan kesiapan pelaku ekonomi. Maka dari itu, akses harus dilengkapi dengan kebijakan yang memperkuat pemanfaatan (*skills*, layanan digital, dan ekosistem) (Czernich et al., 2011).

2.1.5.2 Indikator Akses Internet

Indikator akses internet merupakan ukuran empiris yang digunakan untuk menilai seberapa luas dan efektif suatu populasi atau wilayah dapat terhubung dengan jaringan internet. Penggunaan indikator ini bukan sekedar praktik statistik semata, tetapi juga berakar pada kerangka teoritis mengenai *digital divide* (kesenjangan digital) dan adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam

literatur kajian ICT (*Information and Communication Technology*), indikator-indikator itu sering dirumuskan berdasarkan pedoman internasional seperti ICT *Development Index* (IDI) yang disusun oleh *International Telecommunication Union* (ITU) dan Lembaga riset lain seperti OECD (Bashir, 2013).

Secara teoritis, pengukuran akses internet mengacu pada konsep *availability* (ketersediaan infrastruktur) dan *adoption/penetration* (penggunaan oleh masyarakat). Kerangka ini didukung oleh kajian empiris yang menggunakan ukuran penetrasi broadband dan penggunaan internet sebagai variabel utama kondisi masyarakat dalam hal *digital inclusion* dan *digital economy* (Jakopin & Klein, 2014.). Berikut beberapa indikator yang lazim dipakai beserta dasar teorinya:

a) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Internet

Persentase ini merupakan indikator dasar yang banyak digunakan dalam indeks pembangunan dan perkembangan ICT global. Indikator ini menunjukkan proporsi rumah tangga yang secara fisik memiliki koneksi internet di tempat tinggalnya. Ukuran ini menjadi tolak ukur awal untuk mengevaluasi *availability* infrastruktur dan kesiapan teknologi di tingkat rumah tangga. Kerangka ini selaras dengan pendekatan ICT *access* dalam indeks IDI, di mana akses rumah tangga menjadi salah satu komponen utama pengukuran perkembangan ICT.

Di Indonesia, indikator ini umumnya diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Menurut BPS (2023) rumah tangga yang memiliki akses internet sebagai rumah tangga yang dapat menggunakan internet di tempat tinggalnya, baik melalui perangkat komputer, laptop, maupun telepon seluler. Data ini banyak digunakan dalam penelitian

ekonomi regional karena mampu menggambarkan kondisi akses internet secara lebih merata dan representatif dibandingkan indikator individual semata.

b) Penetrasi Pengguna Internet (*Internet Penetration Rate*)

Penetrasi pengguna internet menunjukkan persentase individu yang menggunakan internet dalam periode tertentu (misalnya 3 bulan terakhir), indikator ini menggambarkan sejauh mana masyarakat tidak hanya memiliki akses tetapi juga aktif terhubung dan menggunakan jaringan internet. Ini berkaitan dengan konsep *adoption* dalam riset teknologi informasi yang menilai bagaimana teknologi baru diadopsi di masyarakat (Sa'diyah & Munzaroh, 2023).

c) Jumlah Langganan Broadband Tetap dan Seluler per 100 Penduduk

Indikator ini mencerminkan tingkat enetrasi layanan internet berbasis broadband *acces*, penekanan diberikan pada penggunaan broadband sebagai tolak ukur kualitas dan kedalaman akses internet karena broadband mencerminkan konektivitas yang lebih cepat dab stabil dibanding koneksi.

d) Kecepatan dan Kualitas Koneksi Internet

Meskipun tidak selalu dimasukkan dalam semua indeks dasar, kecepatan rata-rata internet menjadi indikator penting dalam riset ICT modern karena kualitas akses dapat memengaruhi kemampuan melakukan aktivitas digital produktif. Artikel-artikel empiris baru juga menilai *internet bandwidth* atau kecepatan sebagai indikator akses ICT yang berkontribusi pada pembangunan manusia dan ekonomi.

2.1.5.3 Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovation Theory*)

Teori Difusi Inovasi dikemukakan oleh Everret M. Rogers dan menjelaskan bagaimana suatu inovasi, termasuk teknologi internet menyebar dan diadopsi dalam

suatu sistem sosial dari waktu ke waktu. Rogers menyatakan bahwa tingkat adopsi teknologi dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap keunggulan relatif, kesesuaian dengan kebutuhan, kompleksitas, kemudahan uji coba, dan kemudahan diamati dari inovasi tersebut.

Dalam konteks akses internet, teori ini menjelaskan bahwa perbedaan tingkat penggunaan internet antarwilayah terjadi karena variasi kecepatan adopsi teknologi digital oleh masyarakat. Wilayah dengan infrastruktur memadai, tingkat pendidikan lebih tinggi, serta dukungan institusi yang kuat cenderung lebih cepat mengadopsi internet dapat dipahami sebagai hasil dari proses difusi inovasi yang tidak merata, yang selanjutnya berdampak pada ketimpangan ekonomi antar wilayah (Rogers, 2003).

2.1.5.4 Teori Kesenjangan Digital (*Digital Divide Theory*)

Teori Kesenjangan Digital berkembang dari kajian sosial dan ekonomi yang menyoroti ketimpangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan konsep ini adalah Jan van Dijk yang menekankan bahwa kesenjangan digital tidak hanya mencakup akses fisik terhadap internet, tetapi juga mencakup perbedaan keterampilan digital dan kemampuan memanfaatkan teknologi secara produktif.

Menurut van Dijk (2012) kesenjangan digital ke dalam beberapa tahap yaitu kesenjangan motivasi, akses fisik, keterampilan, dan penggunaan. Dalam kerangka ini, akses internet menjadi indikator penting untuk mengidentifikasi ketimpangan pembangunan digital antarwilayah. Wilayah dengan akses internet yang terbatas

berpotensi tertinggal dalam aktivitas ekonomi modern, sehingga memperbesar kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada kumpulan studi yang telah diselesaikan sebelumnya, yang relevan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian terdahulu ini adalah untuk melakukan perbandingan mendalam dan memberikan validasi terhadap hasil analisis yang telah diperoleh. Ringkasan dari penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(Huda & Indahsari, 2021), Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, dan Pengeluaran Perkapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018.	Rata-Rata Lama Sekolah dan menggunakan analisis regresi data panel.	PMDN, Upah Minimum Provinsi, Akses Internet.	Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per kapita tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan Angka Harapan Hidup berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.	Buletin Ekonomika Pembangunan
2	(Aulya, 2025), Analisis Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap PDRB per kapita Provinsi di Indonesia Tahun 2022	Rata-Rata Lama Sekolah	PMDN, Upah Minimum Provinsi, Akses Internet. Tidak menggunakan regresi data panel.	RLS berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB per kapita.	MUSYTARI, Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi.
3	Winarni (2023), Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap	Upah Minimum Provinsi	Rata-Rata Lama Sekolah, PMDN, Akses Internet. Tidak menggunakan regresi data panel.	UMP dan Petumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan, sementara Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB per	<i>Ekonomis: Journal of Economics and Business.</i>

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PDRB per kapita Provinsi Jambi.			kapita di Provinsi Jambi.	
4	(Yeni et al., 2025) Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara 2010-2020.	Rata-Rata Lama Sekolah	PMDN, Upah Minimum Provinsi, Akses Internet. Tidak menggunakan regresi data panel.	Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap PDRB Sulawesi Tenggara.	<i>Journal of Economic, Business, and Engineering (JEBE).</i>
5	(Manihuruk et al., 2025.) (<i>Analysis of the Influence of PMDN and PMA on GRDP in North Sumatera</i>)	Penanaman Modal Dalam Negeri, Menggunakan analisis regresi data panel.	Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, Akses Internet	PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.	Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (SEKP)
6	(Saskia & Yusnida, 2022) Pengaruh Tenaga Kerja, UMP dan PAD Terhadap PDRB per kapita di Wilayah Sumatera 2010-2020.	Upah Minimum Provinsi, Menggunakan analisis regresi data panel.	Rata-Rata Lama Sekolah, PMDN, Akses Internet	Tenaga Kerja, UMP, dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Per Kapita di Wilayah Sumatera tahun 2010- 2020.	<i>Convergence: The Journal of Economic Development.</i>
7	(Pertama & Miati, 2024.) <i>The Effect of Regional Minimum Wage on Gross Regional Domestic in Regencies and Cities in Bali Province.</i>	Upah Minimum Provinsi, Menggunakan analisis regresi data panel.	Rata-Rata Lama Sekolah, PMDN, dan Akses Internet.	UMP berpengaruh Positif terhadap PDRB.	<i>International Journal of Multidisciplina ry Research dan Publications.</i>
8	(Maharani et al., 2025) Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Pengeluaran per kapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2019-2023	Penanaman Modal Dalam Negeri, dan metode penelitian menggunakan data panel.	Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, Akses Internet	PMDN dan Pengeluaran Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan, sementara PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	(Fitriyani & Fisabilillah, 2022) Analisis Pengaruh PMDN dan PMA terhadap PDRB per kapita Jawa Timur.	Penanaman Modal Dalam Negeri	Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, Akses Internet. Serta menggunakan analisis regresi linier sederhana.	Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan terhadap tingkat PDRB di Provinsi Jawa Timur.	<i>Journal of Economics</i>
10	(Zulhija & Benardin, 2025) Pengaruh Infrastruktur Publik terhadap PDRB per kapita tahun 2013-2022.	Penanaman Modal Dalam Negeri, Menggunakan analisis regresi data panel.	Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, Akses	Variabel Air, PMDN, PMA, dan IPM berpengaruh positif signifikan, sementara Listrik, Telepon, dan Tenaga Kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap PDRB per kapita.	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)
11	(Soleman et al., 2023) Kontribusi Variabel Makro Ekonomi (Studi Determinan Ekonomi Indonesia) tahun 2010-2020.	Rata-Rata Lama Sekolah, dan Penanaman Modal Dalam Negeri, Menggunakan analisis regresi data panel.	Upah Minimum Provinsi, dan Akses Internet.	PMDN, Jumlah penduduk miskin, Indeks Harga Konsumen berpengaruh positif, sementara TPAK, RLS, AHH berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
12	(Luthfi & Prof. Dr. M. Pudjihardjo, 2024) Pengaruh Penggunaan Internet Terhadap Pendapatan Per kapita dan ketimpangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Akses Internet, Menggunakan analisis regresi data panel.	Rata-Rata Lama Sekolah, PMDN, Upah Minimum Provinsi.	Akses internet, Pendidikan, dan Kesejahteraan berpengaruh signifikan terhadap PDRB.	Repository Universitas Brawijaya
13	(Farhan & Idris, 2025) Dampak Infrastruktur Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Akses Internet, Menggunakan analisis regresi data panel.	Rata-Rata Lama Sekolah, PMDN, Upah Minimum.	Akses Internet dan Panjang Jalan berpengaruh signifikan terhadap PDRB, sementara Akses Listrik dan Sarana Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB perkapita.	Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	(Haikal & Anward, 2023) Dampak Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Tingkat Provinsi di Indonesia	Akses Internet, Menggunakan analisis regresi data panel.	Rata-Rata Lama Sekolah, PMDN, Upah Minimum	Akses Internet, Penggunaan Telepon Seluler, dan Komputer berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita provinsi di Indonesia.	JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
15	(Abidin et al, 2023) Pengaruh Pendidikan dan Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Rata-Rata Lama Sekolah, Menggunakan analisis regresi data panel.	Upah Minimum, PMDN, Akses Internet.	Rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Ekonomi Pembangunan
16	(Kusuma Retno, 2023) Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.	Rata-rata lama sekolah.	Upah minimum, PMDN, Akses internet.	Rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)
17	(Putri, 2023) Pengaruh Disparitas Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.	Disparitas pendidikan, Rata-rata lama sekolah.	Upah minimum, PMDN, Akses internet.	Rata-rata lama sekolah berpengaruh positif signifikan.	<i>Parahyangan Economic Development Review</i> .
18	(Syahbana et al. 2025) Pengaruh Upah minimum, dan Jumlah penduduk miskin terhadap Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2001-2022.	Upah minimum.	Rata-rata lama sekolah, PMDN, Akses Internet.	Upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
19	(Athallah et al. 2025) Pengaruh Upah Minimum, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap	Upah Minimum	Rata-rata lama sekolah, PMDN, Akses internet.	Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.	Socius (Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial).

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	penyerapan tenaga kerja di Indonesia Tahun 2015-2023.				
19	(Maharani et al. 2025) Pengaruh PMDN, PMA, dan Pengeluaran per kapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.	PMDN	Rata-rata lama sekolah, Upah minimum, Akses internet.	PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)
20	Setyaningsih et al, 2025) <i>The Effect of Foreign Investment (FDI) and Domestic Investment (PMDN) on Economic Growth in Indonesia Through Infrastructure As an Intervening Variable in 2017-2023.</i>	PMDN	Rata-rata lama sekolah, Upah minimum, Akses internet.	PMDN berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	<i>Formosa Journal of Social Sciences</i> (FJSS)
21	(Maurseth 2018) <i>The effect of the Internet on economic growth: Counter-evidence from cross-country panel data.</i>	Akses Internet, Analisis Regresi Data Panel.	Rata-rata lama sekolah, Upah minimum, PMDN.	Akses Internet berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	<i>Economics Letters</i>
22	(Vu 2019) <i>The internet-growth link: An examination of studies with conflicting results and new evidence on the network effect. Telecommunications Policy,</i>	Akses Internet.	Rata-rata lama sekolah, Upah minimum, PMDN.	Akses Internet berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	<i>Telecommunications Policy.</i>
23	(Farhan & Idris 2024) Dampak Infrastruktur Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.	Akses Internet	Rata-rata lama sekolah, Upah minimum, PMDN.	Akses Internet berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep yang menjelaskan serta menentukan persepsi dan hubungan antara variabel yang diteliti dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka. Berdasarkan teori yang ada, penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Rata-rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Akses Internet terhadap PDRB per kapita di Pulau Jawa periode 2016-2024.

2.2.1 Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah dengan PDRB per kapita

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun yang ditempuh penduduk dalam mengikuti pendidikan formal. Secara khusus, RLS diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang berhasil diselesaikan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan tidak memasukkan tahun pendidikan yang dijalani secara berulang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim & Rosini (2023) pada studi internasional yang menemukan bahwa *mean years of schooling* (proxy pendidikan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDP per capita. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hepi & Zakiah (2018) menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Tengah. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi atau semakin tinggi, maka modal manusia yang terjadi juga akan meningkat. Modal manusia terjadi dengan melakukan investasi sumber daya manusia, yang dilakukan melalui berbagai jenis dan jenjang pendidikan, pengalaman yang diperoleh dari

kerja, dan kesehatan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah suatu individu dapat berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara teoritis, hubungan antara RLS dan PDRB per kapita dapat dijelaskan melalui Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) yang dikemukakan oleh Becker (1964) dan Schultz (1961). Teori ini menyatakan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi yang dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki produktivitas yang lebih baik, mampu beradaptasi dengan teknologi, serta menghasilkan output yang lebih besar. Peningkatan produktivitas tersebut akan meningkatkan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang pada akhirnya berdampak positif terhadap PDRB per kapita. Selain itu, dalam kerangka Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik (*Solow Growth Model*), kualitas tenaga kerja merupakan faktor penting selain modal fisik dan teknologi. Pendidikan berperan dalam meningkatkan efektivitas tenaga kerja (*effective labor*), sehingga wilayah dengan tingkat RLS yang lebih tinggi cenderung memiliki kapasitas produksi yang lebih besar. Dengan demikian, peningkatan RLS dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Dari sisi empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah dengan tingkat pendidikan penduduk yang lebih tinggi mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, menarik investasi, serta meningkatkan efisiensi proses produksi. Pendidikan juga berkontribusi dalam

memperluas kesempatan kerja di sektor-sektor bernilai tambah tinggi, sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan tercermin dalam kenaikan PDRB per kapita. Selain itu, pendidikan yang lebih lama juga memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi, mengadopsi inovasi, serta memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur ekonomi lainnya. Kondisi ini tentu mempercepat transformasi struktural ekonomi dari sektor berproduktivitas rendah menuju sektor berproduktivitas tinggi yang menjadi salah satu pendorong utama peningkatan PDRB per kapita.

2.2.2 Hubungan Upah Minimum Provinsi dengan PDRB per kapita

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan batas upah terendah yang wajib diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja di tingkat provinsi. Secara teoritis, peningkatan UMP berpotensi menaikkan pendapatan pekerja di sektor formal, yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan daya beli serta konsumsi oleh masyarakat. Peningkatan konsumsi ini akan mendorong permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan output ekonomi daerah dan tercermin dalam kenaikan PDRB per kapita (Saskia & Yusnida, 2022).

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tingkat yang memadai berpotensi mendorong peningkatan motivasi dan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas yang lebih tinggi akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan di suatu wilayah, sehingga dapat berdampak pada peningkatan PDRB per kapita. Namun demikian, apabila kenaikan UMP tidak disertai dengan peningkatan produktivitas, kebijakan tersebut dapat menimbulkan tekanan khususnya bagi pelaku usaha kecil dan sektor informal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra & Ridwan (2025) menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Selain itu, penelitian yang dilakukan Salsabilla & Aji (2025) menunjukkan bahwa *minimum wage* (upah minimum) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi biasanya berkorelasi dengan kenaikan produktivitas dan kontribusi sektor tenaga kerja terhadap PDRB per kapita.

Secara konseptual, kenaikan UMP akan meningkatkan pendapatan pekerja formal. Peningkatan pendapatan tersebut mendorong kenaikan daya beli dan konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen utama dalam permintaan agregat. Meningkatnya konsumsi masyarakat akan merangsang peningkatan produksi barang dan jasa oleh pelaku usaha. Peningkatan output ini pada akhirnya tercermin dalam kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga berdampak pada peningkatan PDRB per kapita.

Selain melalui jalur konsumsi, UMP juga berpengaruh terhadap PDRB per kapita melalui produktivitas tenaga kerja. Penetapan upah minimum yang memadai dapat meningkatkan motivasi kerja, loyalitas, dan kualitas kinerja tenaga kerja. Tenaga kerja yang lebih produktif akan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perusahaan dan sektor ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan nilai tambah ini menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan PDRB per kapita di suatu wilayah. Kenaikan UMP juga dapat menciptakan iklim ekonomi yang lebih stabil dengan mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kondisi tersebut berpotensi memperkuat stabilitas sosial dan

mendorong investasi, terutama pada sektor-sektor yang padat karya dan berorientasi pada pasar domestik. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi, kapasitas produksi daerah akan meningkat, sehingga berdampak positif terhadap PDRB per kapita.

Namun, pengaruh UMP terhadap PDRB per kapita sangat bergantung pada kemampuan sektor usaha dalam menyesuaikan diri terhadap kenaikan upah. Apabila kenaikan UMP diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, maka dampak yang dihasilkan cenderung positif. Oleh karena itu, dalam kerangka pemikiran ini UMP diasumsikan memiliki hubungan positif dengan PDRB per kapita, terutama melalui jalur peningkatan pendapatan, konsumsi, dan produktivitas tenaga kerja.

2.2.3 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap PDRB per kapita

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau masyarakat domestic dengan memanfaatkan modal keuangan maupun asset produktif yang bertujuan untuk memperluas skala usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional maupun regional.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tajudin (2023) menunjukkan bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita, selain itu penelitian lain yang dilakukan oleh Wardani et al., (2024) juga menemukan bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki peran penting dalam

perekonomian suatu wilayah. Selain berfungsi sebagai pendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan daerah, PMDN juga berkontribusi dalam menjaga penguasaan dan pemanfaatan sumber daya lokal agar tetap berada di tangan pelaku usaha domestik sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Secara teoritis, peningkatan PMDN akan menambah akumulasi modal fisik, memperluas kapasitas produksi, serta menciptakan lapangan kerja, sehingga meningkatkan output ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB. Oleh karena itu, peningkatan PMDN dipandang sebagai instrument strategis dalam mendorong pertumbuhan PDRB per kapita dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.4 Hubungan Akses Internet terhadap PDRB per kapita

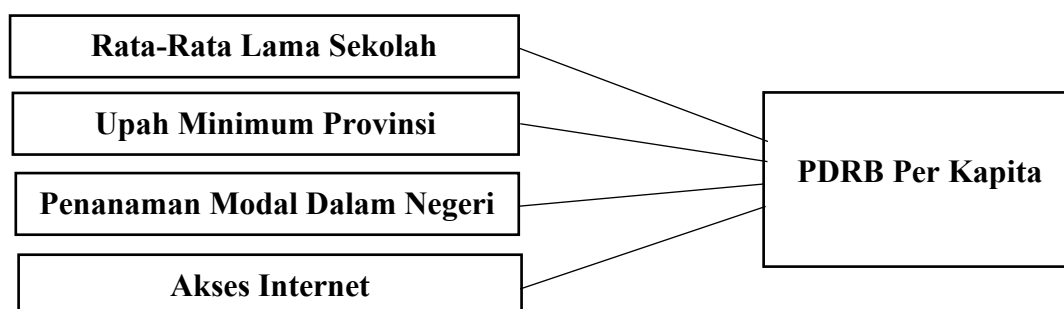
Akses internet merupakan kemampuan individu, rumah tangga, maupun pelaku usaha untuk terhubung dan memanfaatkan jaringan internet dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan produktif. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, akses internet berperan sebagai infrastruktur digital yang mempercepat aliran informasi, menurunkan biaya transaksi, juga meningkatkan efisiensi produksi. Hubungan antara akses internet dan kinerja ekonomi dapat dijelaskan melalui Teori Difusi Inovasi yang dikemukakan oleh Rogers (2003), yang menyatakan bahwa adopsi teknologi baru termasuk teknologi informasi dan komunikasi akan mendorong perubahan perilaku ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta penyebaran inovasi secara lebih cepat. Dengan semakin luasnya akses internet, proses adopsi

teknologi dan inovasi di suatu wilayah akan meningkat, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PDRB per kapita.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa akses internet memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita maupun pertumbuhan ekonomi regional. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Alifia & Andrianus (2024) menemukan bahwa akses internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Peningkatan persentase penduduk yang memiliki akses internet mampu meningkatkan produktivitas sektor ekonomi, mendorong pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan, serta memperluas peluang usaha berbasis digital. Penelitian internasional yang dilakukan oleh Choi & Hoon Yi (2009) juga menunjukkan bahwa penetrasi internet yang lebih tinggi berkorelasi positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita terutama di negara berkembang, karena internet memperkuat integrasi pasar dan efisiensi ekonomi.

Akses internet dipandang sebagai faktor pendorong utama peningkatan PDRB per kapita melalui beberapa mekanisme. Pertama, akses internet meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan mempermudah akses informasi, pelatihan, dan teknologi. Kedua, internet mendorong pertumbuhan ekonomi digital seperti *e-commerce* dan jasa berbasis daring yang mampu menciptakan nilai tambah baru dan memperluas pasar. Ketiga, akses internet memperkuat inklusi ekonomi dengan membuka peluang usaha bagi UMKM dan masyarakat di berbagai wilayah. Melalui mekanisme tersebut, peningkatan akses internet akan mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan output regional dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan PDRB per kapita.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut bahwa Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Akses Internet mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita. Oleh karena itu, dapat disusun kerangka pemikiran pada penelitian yang penulis lakukan dapat disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui pengujian. Secara umum, hipotesis harus melibatkan minimal satu variabel independent dan satu variabel dependen. Peneliti merumuskan hipotesis berdasarkan hasil kajian teori yang telah dilakukan. adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Diduga secara parsial Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Akses Internet berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita di Pulau Jawa Tahun 2016-2024.

- b) Diduga secara simultan Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita di Pulau Jawa tahun 2016-2024.